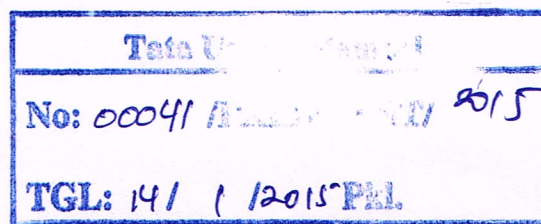


Hal: Efisiensi Kinerja Dan Pemborosan Anggaran Negara Disebabkan Kebijakan Yang Tidak Tepat.

Kepada Yth.
Bapak PRESIDEN JOKO WIDODO
Di Istana Negara



Dengan hormat, salam 2 Jari.

Sebagaimana keinginan Bapak Presiden yang ingin melakukan penghematan anggaran dan efisiensi Kinerja Lembaga, bersama ini kami sampaikan beberapa hal berkaitan dengan hal tersebut khususnya tentang pemborosan anggaran di lingkungan Kementerian Kebudayaan dan pendidikan dasar dan pendidikan menengah, di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan.

1. Banyaknya UPT Kebudayaan yang tumpang tindih dan tidak tepat kinerja hanya pemborosan anggaran, diantaranya: BPNB, BPCB, BALAR, BALAI BAHASA. Semua itu merupakan UPT dalam jajaran KEBUDAYAAN.
2. Setelah BIDANG KEBUDAYAAN merger dengan pendidikan kinerja UPT semakin hari terus mengalami kemerosotan dan tidak ada menunjukkan hasil yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat dan negara. Pengawasan UPT-UPT sejak digabung dengan pendidikan nyaris sudah tidak ada, dibanding sebelumnya sewaktu UPT berada dalam lingkungan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Ditjen Kebudayaan memberikan pengawasan penuh pada UPT diberbagai provinsi.
3. Banyak kegiatan/proyek yang dilaksanakan tumpang tindih antar sesama UPT, terhadap kegiatan yang sama dilakukan oleh beberapa UPT sehingga mengakibatkan dabel anggaran dan pemborosan anggaran. Disamping itu, keberadaan UPT tidak jelas pengaturannya mengakibatkan menyulitkan masyarakat maupun pemerintah daerah yang ingin memperoleh data dan informasi. Padahal setiap provinsi pasti ada satu UPT kebudayaan tapi nama dan tupoksi dibeda-bedakan sehingga sangat tidak efisien.
4. Soal tumpang tindih dan dabel anggaran, sudah sangat sering terjadi seolah pihak kementerian tidak memahami hal tersebut, atau memang tidak faham. Misalkan ada kegiatan tentang inventaris sejarah atau cerita rakyat, hal yang sama dilakukan oleh beberapa UPT sehingga sangat memboroskan, bahkan kegiatan yang sama juga dilakukan oleh DINAS KEBUDAYAAN. Belum lagi biaya perjalanan dinas yang dikeluarkan akibat wilayah kerja yang sengaja dipecah-pecah masing-masing UPT membawahi 3 atau 4 provinsi, ini sungguh aneh dan tidak masuk diakal dengan tidak beraturan antara beberapa UPT tersebut. padahal pekerjaan mereka adalah sama mengumpulkan data KEBUDAYAAN. Alangkah lebih eloknya setiap provinsi dibuat hanya 1 UPT dengan nama UPT KEBUDAYAAN dengan merangkum pekerjaan budaya melalui 1 atap tiap provinsi, hal itu akan memberikan penghematan yang sangat besar dalam perjalanan dinas dan efisiensi pekerjaan.
5. Atau lebih bijak lagi, dengan menggabungkan seluruh UPT di provinsi sesuai dengan domisili provinsinya, sehingga semua pekerjaan kebudayaan hanya di kordinasikan lewat 1 pintu yaitu DINAS KEBUDAYAAN yang memang melaksanakan tupoksi sesuai dengan UPT-UPT tersebut. Lini lebih efisien dan terkoordinir.
6. Banyak sekali tumpang tindih dan ketidak efisien dari kinerja UPT yang tidak jelas pembagian kerja antara satu dan lainnya. Dan perlu dipertanyakan apakah keberadaan UPT tersebut hanya bertugas melayani tamu jakarta saja atau untuk kepentingan seluruh bangsa INDONESIA baik pusat maupun daerah, yang di gaji dan dibiayai dari uang rakyat dan uang negara, jadi mengapa harus dipisah-pisah, sekali lagi tidak jelas apa yang ingin dicapai dari pemecahan dan penyebaran UPT yang tidak seharusnya demikian.
7. BAHKAN, dinegara yang paling maju kebudayaannya seperti Prancis, Jepang dan lainnya, tidak ada lembaga ngaco dengan berbagai nama seperti di Indonesia ini, tetapi data dan pelestarian kebudayaan mereka dapat jauh lebih maju dari INDONESIA, bahkan dengan Malaysia pun kita jauh tertinggal soal pelestarian budaya padahal sekali lagi mereka tidak

memiliki UPT ngaco dan ribet seperti Indonesia. Tapi semua pekerjaan tersebut mereka koordinasikan lewat satu atap, kementerian, atau melalui museum yang tersebar di berbagai daerah. Di Prancis semua pekerjaan menyangkut kebudayaan apakah itu inventarisasi, pendataan, penelitian, atau cagar budaya, semua itu cukup dikordinasikan kepada MUSEUM semua masalah diselesaikan di situ, sehingga masyarakat yang ingin memperoleh informasi dengan mudah mengakses di MUSEUM yang mereka miliki. Di Indonesia, jika ingin memperoleh data Budaya maka orang atau siswa sekolah harus mutar-mutar di UPT yang yang tidak jelas pembagian tugas dan pekerjaannya tersebut. padahal jika di gabung atau dilebur akan lebih memberikan manfaat bagi semua. Artinya lebih baik di hapuskan lalu digabungkan dengan DINAS KEBUDAYAAN dimasing-masing daerah, itu lebih tepat.

8. Demikian disampaikan lebih dan kurang mohon maaf. Semoga mendapat tindak lanjut dari Bapak Presiden dalam rangka efisiensi kinerja lembaga dan penghematan anggaran. Perlu instruksi perbaikan dari Bapak, tanpa itu, karena birokrasi di negara ini terlanjur berbelit-belit dan sangat birokratis tanpa hasil yang baik cepat dan tepat.
- 9.

Hormat kami
Masyarakat Cinta Budaya

M. Murat

Tembusan yth.

1. Sekretaris Kabinet, Kabinet Kerja
2. MenPAN dan RB, Kabinet KERJA
3. Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Kabinet Kerja

(mohon maaf, gerakan mas Menteri di bidang Kebudayaan terasa lambat dan jalan ditempat artinya tidak ada bedanya kinerja bidang ini dengan masa kepemimpinan SBY. Ingat mas menteri tugas anda tidak hanya soal kurikulum tetapi keseluruhan tupoksi dari kementerian menjadi tanggungjawab anda. Dirjen dan direktur (serta kepala UPT jika masih ingin dipertahankan) harus ada kompetensi atau lelang jabatan, pejabat lama tidak bisa terlalu anda harapkan semua hanya dagelan dan angin surga, tidak ada terobosan baru untuk kemajuan dunia KEBUDAYAAN INDONESIA. ABS belaka. Bahkan nama kementerian ini ditingkat UPT belum mengacu pada kabinet kerja padahal sudah berjalan menuju setengah tahun. Masih menggunakan nama KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN seharusnya "Kementerian kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan pendidikan Menengah" tapi jika mengacu pada EYD seharusnya dan lebih tepatnya adalah "kementrian Kebudayaan, pendidikan dasar dan menengah".)

4. Menko SDM dan Kebudayaan Kabibet Kerja
5. Ketua Komisi IX DPR RI, bidang seni budaya

Nb. Semua yang kami sampaikan ini tidak ada maksud apapun selain hanya ingin melihat perubahan nyata Kabinet Kerja untuk dapat berbuat lebih baik dan menanamkan sesuatu yang baru sebagai tonggak sejarah ke depan secara menyeluruh sebagaimana yang diinginkan oleh Bapak Presiden kita.